



**PEMENATAAN MALIOBORO**

## Pelaku Usaha Tuntut PKL Ditata Dulu

Abdul Hamid Razak  
hamied@harianjogja.com

JOGJA—Pelaku usaha di Malioboro masih mempertanyakan konsep penataan pedagang kaki lima (PKL). Sebab, baik tidaknya Malioboro juga tergantung dari kondisi PKL yang saat ini semrawut.

Desain yang saat ini diajukan pemerintah daerah diminta untuk diubah. Dalam desain baru penataan di Malioboro, PKL akan dipindah dari depan toko ke antara tiang-tiang toko. Nantinya, ada PKL yang menghadap toko dan ada yang menghadap kawasan pedestrian.

Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) Budhi Susilo menyambut positif saat penerapan Malioboro bebas dari kendaraan bermotor.

Namun, penerapan tersebut tidak cukup jika Penda DIY dan Pemkot tidak menata dan menertibkan PKL. "Saat Selasa Wage [PKL libur berjalan], omzet kami bertambah. Saya bisa bayar angsuran. Ini berbeda saat PKL buka," kata Budhi, Kamis (20/6).

Budhi pun mempertanyakan penataan PKL yang sejak bertahun-tahun tidak kunjung selesai. Menurutnya, keberadaan PKL yang menduduki lahan...

secara ilegal sangat merugikan pemilik toko. Selain mengganggu akses masuk, keberadaan mereka di sepanjang Malioboro juga dinilai tidak mengontongi izin. Padahal sesuai dengan Perwal No.37/2010 pasal II, kata Budhi, untuk menempati lahan tersebut PKL harus mengontongi izin dari pemilik toko.

Bahkan, lanjut dia, semua pengusaha di Malioboro tidak pernah memberikan izin sejak izin yang digunakan kedeluwarsa, termasuk dirinya. Atas hal itu, dia pun memasang pot-pot tanaman di depan tokonya agar PKL tidak lagi menggunakan lahan pribadi. Penempatan pot-pot tanaman tersebut juga dijadikan akses bagi pengunjung toko miliknya.

"Saya meminta Dinas PUP-ESDM DIY mengubah desain penataan PKL karena masih menempatkan PKL di depan toko kami. Desain [penataan PKL] yang beredar saat ini masih belum diubah," katanya.

Hal senada disampaikan Tunggono, salah satu pemilik toko di Malioboro. Menurutnya, penataan kawasan Malioboro selama ini masih belum menyentuh persoalan di Malioboro.

**Pelaku Usaha...**

Dia mengatakan hingga saat ini belum ada tindakan yang tegas dari Pemkot terhadap PKL yang melanggar.

"Mereka menempati lahan kami. Kalau pemerintah mau merelokasi PKL di kawasan pedestrian Malioboro silakan, kami hanya minta mereka ditata," katanya.

Selama ini, Pemkot terkesan melakukan praktik pembiaran sehingga jumlah PKL sampai saat ini sudah mencapai ribuan orang. Pemkot juga dinilai membiarkan proses pelanggaran tersebut sehingga merugikan pemilik toko.

"Kalau Pemkot mau, merelokasi PKL di tempat strategis. PKL ini tidak mau sadar kalau mereka melanggar hukum," katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Kepala Dinas PUP-ESDM DIY Bambang Widyo Sadmo mengaku desain yang ada saat ini hanyalah salah satu dari sekian banyak gagasan penataan PKL.

Dari desain tersebut, PKL berada di antara tiang-tiang depan toko dan diberi kanopi. Desain itu juga digunakan sebagai materi sosialisasi awal pada 2014 lalu.

"Itu bukan detail engineering design [DED], jadi memang masih bisa diubah," kata mantan Sekretaris Dinas PUP-ESDM itu.

Menurutnya, penataan PKL sendiri bukan tanggung jawab Penda DIY melainkan wewenang dari Pemkot. Tugas Dihas PUP-ESDM DIY dinilai sudah selesai dengan menyiapkan infrastruktur pada 2016-2018 lalu. Saat ini mulai ditata lalu lintas yang merupakan kewenangan Dinas Perhubungan.

Untuk penataan PKL konsepnya lebih banyak desain dari Pemkot.

"Arahannya umum dari Ngarso Dalem [Sri Sultan HB X], Malioboro tempat hidup bersama, tidak saling mengganggu atau mematikan. Jangan asal pokoknya. Semua bisa menikmati Malioboro," katanya.

Sebelumnya, Sekda DIY Gatot Saptadi menjelaskan Malioboro selama ini menjadi ikon wisata belanja di Jogja. PKL Malioboro akan ditata agar lebih rapi dan tidak semrawut.

"Agar terlihat bagus, posisi PKL nantinya diubah. Kalau selama ini ada PKL yang melekat pada toko, nempel di toko maka ke depan akan diubah. Tidak ada lagi PKL yang nempel di toko," katanya, Rabu (12/6).

Selengkapnya, PKL yang selama ini nempel di toko-toko sehingga mengganggu akses orang masuk toko akan ditempatkan secara berderetan. Mereka akan dijejerkan di sepanjang tiang-tiang (pilar depan) toko. PKL juga dilarang menggelar dagangannya di jalur pedestrian. Termasuk rombongannya.

"Nanti ada PKL yang menghadap toko, ada yang menghadap jalur pedestrian, jadi nder-unduran. Yang ada menghadap dan membelakangi toko. Kalau jualan di pedestrian tentu akan ditertibkan," ujar Gatot.

Dengan begitu, diharapkan wisatawan yang datang bisa leluasa lewat dan nyaman berjalan-jalan lebih lama. Penataan tersebut akan dilaksanakan seiring rampungnya jalur pedestrian di sisi barat dan timur Malioboro.

1. UPT M  
 Netral  
 Biasa  
 Untuk

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005